

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan diatas,maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kurator selain diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat juga peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kurator itu sendiri. Dalam UU Kepailitan dan PKPU bentuk perlindungan yang diberikan berupa kebebasan dalam hal kewenangan kurator sebagaimana di atur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU sedangkan perlindungan kurator pada peraturan lain adanya aturan dalam Pasal 50 KUHP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kode etik Kurator, serta Jaminan Idenpedensi kurator sebagai bentuk perlindungan terhadap kapasitas kurator. Kemudian perlindungan terhadap pribadi kurator adanya aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
2. Tanggung Jawab Kurator dalam perundang-undangan terdapat dalam beberapa aturan yang pertama pertanggungjawaban kurator dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu terdapat dalam Pasal 72 dan Pasal 78 UU Kepailitan dan PKPU. Tanggung jawab Balai Harta Peningalan, Pertanggungjawaban pidana kurator Kurator bertanggung jawab apabila tindakan kurator yang dilakukan tidak sesuai

dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, tanpa itikad tidak baik, serta merugikan harta pailit. Namun jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang dan itikad baik, apabila merugikan harta palit maka kurator tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah bersama-sama dengan DPR diperlukan agar perlindungan hukum terhadap profesi kurator dapat terlaksana yaitu dalam rangka membuat rancangan undang-undang khusus Profesi Kurator dan Pengurus guna menegaskan perlindungan hukum bagi kurator. Karena perlindungan hukum terhadap profesi kurator yang ada sekarang tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan kepada profesi kurator.
2. Kemudian peran aparat kepolisian, bagi aparat kepolisian sangatlah penting untuk mempunyai pengetahuan mengenai kepailitan dan kode etik profesi kurator agar polisi dapat memahami kewajiban dan kewenangan seorang kurator dalam melaksanakan tugasnya, sehingga polisi tidak dengan mudahnya menerima laporan dan menjadikan kurator sebagai tersangka tanpa memeriksa lebih lanjut terhadap kewenangan yang dimiliki oleh seorang kurator.